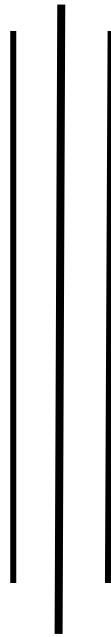




**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

**RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya manusia maupun sumberdaya organisasi secara efektif.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan yang terakhir Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang juga menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

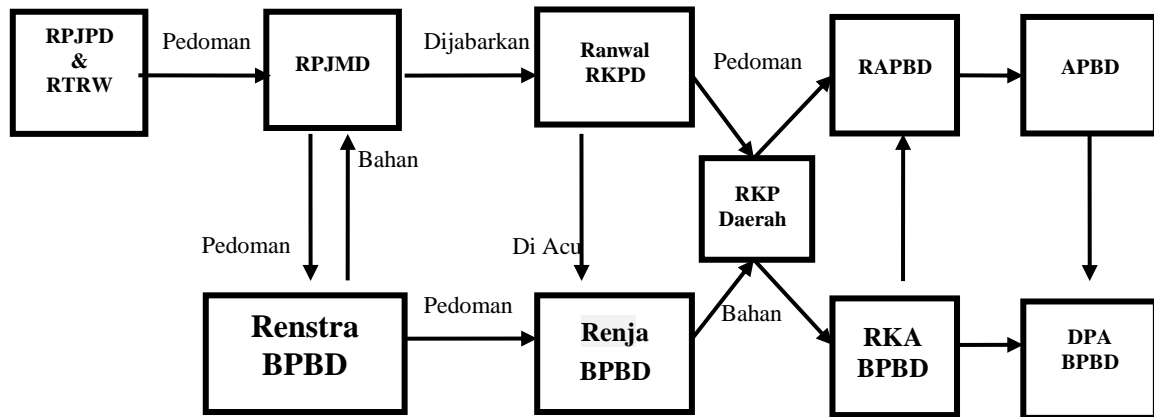
Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 (empat) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi

wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 ini akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2022 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2022. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang terkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja BPBD Kabupaten Malang selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

Tindak lanjut dengan proses penyusunan APBD dari RPJPD yang dilaksanakan melalui RPJMD, dari RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD, RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD, keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD, seluruh program selama 5 (lima) tahun seluruh Renstra mempedomani program prioritas dalam RPJMD, RPJMD dilaksanakan melalui RKPD, Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas, RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD, Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2022 :

- 1) Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2021 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022;
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
- 4) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2022 :

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanggulangan bencana;
- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022;
- 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Perangkat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra BPBD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2020-2021 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020-2021 sesuai penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 dikatakan mengalami keberhasilan antara lain :

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, diketahui bahwa capaian semua indikator dapat dikatakan mengalami keberhasilan antara lain

A. Pada Indikator Persentase Desa Tangguh Bencana dengan target 90,6%, tercapai 90,6% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (33 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) capaian sebesar 100% dapat dikatakan **berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, dengan kegiatan :

1. Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana dengan indikator :

1.1 Pemantauan dan penyebaran informasi kebencanaan dilaksanakan di 57 wilayah sebagai berikut :

- a. Bulan Januari : 4 wilayah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Wirotaman Kecamatan Dampit, Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo, dan Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading;
- b. Bulan Februari : 1 wilayah di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau;
- c. Bulan Maret : 14 wilayah di Desa Ngabab Kecamatan Pujon, Desa Pandansari Kecamatan Ngantang, Desa Langlang Kecamatan Singosari, Desa Bedali Kecamatan Lawang, Desa Bocek Kecamatan Karangploso, Desa Kluwut Kecamatan Wonosari, Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji, Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi, Desa Poncokusumo

Kecamatan Poncokusumo, Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan, Desa Bantur Kecamatan Bantur, Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir, Desa Kidangbang Kecamatan Wajak, dan Desa Ngajum Kecamatan Ngajum;

- d. Bulan April : 12 wilayah di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang, Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung, Desa Kalipare Kecamatan Kalipare, iDesa Tumpang Kecamatan Tumpang, Desa Sumberporong Kecamatan Lawang, Desa Dengkol Kecamatan Singosari, Desa Pakis Kecamatan Pakis, Desa Kemantren Kecamatan Jabung, Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran, Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Kromengan Kecamatan Kromengan, dan Desa Tajinan Kecamatan Tajinan;
- e. Bulan September : 12 wilayah di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Pagak Kecamatan Pagak, Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung, Desa Srigonco Kecamatan Bantur, Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare, Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, Desa Urek Urek Kecamatan Gondanglegi, Desa Jabung Kecamatan Jabung, Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan, Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon, Desa Sidoluhur, dan Kecamatan Lawang;
- f. Bulan Oktober : 6 wilayah di Desa Argoyuwono Kecamatan Ampelgading, Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso, Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo, Desa Duwet Kecamatan Tumpang, Desa Asrikaton Kecamatan Pakis, dan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo; dan
- g. Bulan November : 8 wilayah di Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon, Desa Wono Agung Kecamatan Tirtoyudo, Desa Gedangan Kecamatan Gedangan, Desa Taman Asri Kecamatan Ampelgading, Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak, Desa Sumberbening Kecamatan Bantur, Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan Desa Banjararum Kecamatan Singosari.

1.2 Pengurangan Resiko Bencana.

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2025 dilakukan oleh jasa konsultan CV. Irama Tembang Elok pada bulan November-desember 2020.

Dokumen RPB Covid-19 Kabupaten Malang merupakan rencana dan panduan yang bersifat lintas sektor dan lintas bidang dalam rangka penanggulangan bencana yang masa berlaku selama 5 (lima) tahun (2020-2025). RPB Covid-19 Kabupaten Malang diharapkan dapat menjadi bagian yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malang pada prioritas pembangunan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang.

Tujuan penyusunan RPB Covid-19 Kabupaten Malang adalah:

1. Panduan daerah dalam penanggulangan bencana terkait pengaruh utama akan isu dan upaya penanggulangan bencana di dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Kabupaten Malang;
3. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Malang menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah;
4. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Melindungi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang dari ancaman bencana.

RPB Covid-19 Kabupaten Malang mempunyai sasaran sebagai pedoman bagi pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang dan masyarakat. Sedangkan sasaran substansial dar PRB Covid-19 Kabupaten Malang adalah:

1. Terarah dan sinergisnya langkah-langkah terkait penanggulangan bencana di tataran Pmerintah Kabupaten Malang serta pemangku kepentingan lainnya;

2. Adanya penurunan resiko bencana serta peningkatan ketahanan masyarakat dan lingkungan fisik di wilayah Kabupaten Malang terhadap ancaman bencana yang potensial terjadi;
3. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1.3 Mitigasi Non struktural

Kegiatan Mitigasi Non Struktural Kabupaten Malang Tahun 2020 melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Ancaman Gempa Bumi di Kabupaten Malang Tahun 2020 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) kali pertemuan yang bertempat di Hotel Syariah Radho Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari Inspektorat, Bappeda, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU SDA, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, DP3A, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPKPCK, Satpol PP, RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang, Bagian Hukum Setda, PMI dan BPBD Kabupaten Malang.

Pertemuan pertama pada tanggal 19 November 2020 bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal potensi gempa yang mungkin terjadi di Kabupaten Malang, melakukan perkiraan dampak yang terjadi akibat gempa yang berpotensi terjadi, dan menyusun rencana awal respon darurat ketika terjadi gempa. Hasil yang diharapkan adalah adanya gambaran awal skenario kejadian gempa yang berpotensi di Kabupaten Malang, adanya gambaran awal skenario dampak dan langkah penanganan bencana yang terjadi akibat gempa, dan adanya dokumen rencana kontijensi untuk merespon secara cepat dan tepat dampak gempa.

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 yang bertujuan untuk mendapatkan review tentang draft nol Dokumen Rencana Kontijensi, melakukan review perkiraan dampak yang terjadi akibat gempa yang berpotensi terjadi, dan melakukan review rencana awal respon darurat ketika suatu saat terjadi gempa. Hasil yang dicapai adalah adanya draft nol dokumen rencana kontijensi yang telah di review oleh peserta kegiatan.

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 yang bertujuan untuk melegalkan dokumen rencana kontijensi ancaman gempa bumi di Kabupaten Malang 2020.

1.4 Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH) yang dilaksanakan di 7 Sekolah sebagai berikut :

- a. Bulan Februari : 5 Sekolah yaitu SDA Ar Rohmah Kecamatan Dau, SDN I Pojok Kecamatan Dampit, SDN I Sumberagung Kecamatan Ngantang, SDN I Kaumrejo Kecamatan Ngantang, dan SDN IV Wandanpuro Kecamatan Bululawang; dan
- b. Bulan Maret : 2 Sekolah yaitu MI Nasyrul Ulum Bocek Kecamatan Karangploso, dan SDN II Wonorejo Kecamatan Singosari.

2. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana dengan indikator :

2.1 Desa Tangguh Bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana yaitu Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo pada tanggal 16 s/d 18 Desember 2020; Desa Gunungjati Kecamatan Jabung pada tanggal 23 s/d 25 Desember 2020; dan Desa Petungsewu Kecamatan Dau pada tanggal 28 s/d 30 Desember 2020. Dalam setiap kegiatan pelatihan dihadiri tim pokja destana sebanyak 30 orang. Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana oleh BPBD Provinsi Jawa Timur yaitu Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan pada tanggal 26 s/d 27 dan 29 Februari 2020 dan Desa Bocek Kecamatan Karangploso pada tanggal 2 s/d 4 Maret 2020. Desa Tangguh Bencana yang terbentuk diharapkan masyarakat mampu menghindari dan menyelamatkan diri dari resiko bencana. Bahkan ke depan mereka juga mampu mencegah kemungkinan terjadinya bencana melalui kegiatan pengurangan resiko bencana.

2.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pengadaan dan pembelian rambu-rambu peringatan dan jalur evakuasi sebanyak 50 buah untuk diberikan kepada daerah rawan bencana.

2.3 Pembentukan Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS)

Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan mengadakan rapat koordinasi terkait tugas pokok dan fungsi Pusdalops serta mengadakan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas Pusdalops berupa :

- a. Smart Phone sebanyak 1 Unit;
- b. Laptop sebanyak 2 Unit; dan
- c. Televisi LED (32 inchi standar).

B. Pada Indikator Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan dengan target 68%, tercapai 68% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (jumlah bencana yang ditangani sebanyak 151 kali dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 151 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 151 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan **berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan kegiatan :

1. Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana, dengan indikator :

1.1 Penanganan Darurat Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan selama tahun 2020 sebanyak 151 kejadian bencana yang telah ditangani, antara lain : Gempa Bumi sebanyak 19 kejadian, Banjir sebanyak 15 kejadian, Angin kencang sebanyak 42 kejadian, Longsor sebanyak 60 kejadian, dan Pohon tumbang sebanyak 15 kejadian. Selama tahun 2020 dalam penanganan bencana telah diberikan bantuan kepada korban bencana berupa paket sembako sebanyak 621 paket sembako dan bronjong sebanyak 535 buah.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar logistik dan Peralatan Bencana, dengan indikator :

2.1 Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan buffer stock sembako yaitu pengadaan 600 paket sembako untuk diberikan kepada korban terdampak bencana.

C. Pada Indikator Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana yang Berhasil Dioperasionalkan dengan target 47% tercapai 47% perhitungan ini berdasarkan, Capaian 100% dapat dikatakan

berhasil kegiatan ini didukung oleh Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana dengan kegiatan :

1. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

1.1 SDM Pahami Pendampingan Psikososial

Kegiatan ini dilaksanakan berupa Pendampingan Psikososial Pasca Bencana yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 12 Maret 2020 bertempat di Hotel Trio Indah 2 Malang yang dihadiri oleh 30 orang terdiri dari BPBD Kabupaten Malang dan Perangkat Desa yaitu Desa Dengkol Kecamatan Singosari, Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari, Desa Tegalwaru Kecamatan Dau, Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, Desa Asrikaton Kecamatan Pakis, Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis, Desa Kemiri Kecamatan Jabung, Desa Gunungjati Kecamatan Jabung, Desa Bokor Kecamatan Tumpang, Desa Tumpang Kecamatan Tumpang, Desa Ngijo Kecamatan Karangploso dan Desa Ngenep Kecamatan Karangploso. Kegiatan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya masalah psikologis serius dan mencegah munculnya perilaku tampilan kondisi kesehatan mental negatif yang disebabkan oleh bencana atau situasi kritis. Diharapkan peserta mampu mempraktekan ilmu yang didapat pada pasca bencana di wilayah masing-masing, khususnya dalam pendampingan psikososial.

2. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

2.1 Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana

Pemulihan rekonstruksi pasca bencana sebanyak 1 (satu) unit pada tahun ini berupa Dokumen Jitu Pasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) sebagai dasar penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Alih kegiatan menjadi Dokumen Jitupasna dikarenakan refocusing sehingga kegiatan yang semestinya dilakukan oleh Tim Jitupasna di tribulan 1 dan 2 dilaksanakan pada tribulan 3 dan 4. Proses penyusunan dilakukan secara daring dengan anggota tim Jitupasna dari Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini dominan dari Dinas Koperasi dan UMKM Karena materi yang dibahas pada Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai kelanjutan Dokumen

Jitupasna adalah berkelanjutan UKM daerah terdampak bencana non alam Covid 19.

Pelaksanaan Jitupasna diperoleh dari penilaian kerusakan dan kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan meningkatnya risiko untuk selanjutnya dijadikan dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Covid-19. Untuk itu maka basisnya diambil sampling dari 3 dalam 3 daerah subsektor wilayah pengembangan di Kabupaten Malang yaitu Desa yaitu Desa Dilem Kecamatan Kepanjen, Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading, dan Desa Bedali Kecamatan Lawang. Hal ini dilakukan mengingat luasan akibat dan dampak Covid-19 meliputi seluruh daerah di Kabupaten Malang. Maka berdasarkan pertimbangan cukup di ambil 3 Desa dalam 3 daerah sub sektor wilayah pengembangan tersebut, yang mana Kabupaten Malang memiliki 6 daerah subsektor wilayah pengembangan. Ini dilakukan karena luasan akibat dan dampak bencana ini sangat luas di satu sisi pemulihan pasca bencana wajib menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungannya sebagai sasaran prioritas pemulihan pasca bencana.

2.2 Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Keterbatasan proses pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sedianya penyusunan dilakukan secara tatap muka antara BPBD, perangkat daerah terkait dan fasilitator serta konsultan, dikarenakan pandemi Covid-19 oleh karena itu pertemuan dilakukan secara daring, penyusunan dokumen melalui proses penggalan data di lapangan dengan secara daring.

2.3 SDM Pengelola Data Kebencanaan untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sumber daya manusia pengelola data kebencanaan untuk pengurangan resiko bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sejumlah 20 orang yaitu operator website desa selaku pengelola data kebencanaan dan Dinas Kominfo Kabupaten Malang dalam rangka rapat koordinasi pendahuluan sebagai penyedia data dasar untuk data kebencanaan. Guna memaksimalkan website desa dalam penyusunan dan

penyediaan basis data kebencanaan dalam pengurangan resiko bencana.

2.4 SDM Paham Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA).

Kegiatan dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi tim kajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna) pada bulan Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 40 orang terdiri dari beberapa pejabat struktural BPBD dan staf, Bappeda, Dinas Kesehatan, PU Bina Marga, PU SDA, DPKPCK, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Kelautan serta para operator SID dari desa-desa yang telah mendapat pelatihan Sistem Infomasi Desa sebagai data kebencanaan. Kegiatan diharapkan pada saat bencana dan pasca bencana, Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana paham tentang proses penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana. Selain itu juga pengadaan rompi untuk personil *check point* pada fase pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Kabupaten Malang.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Program Kedaruratan dan Logistik Penanggungan Bencana. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang sistematis dan terukur dalam upaya penanggulangan bencana. Upaya yang dapat dilakukan baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan

sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang dapat dikurangi.

Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian bencana adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan membuat sarana informasi berbasis teknologi informasi yang menjangkau semua lini sektor dan seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dalam penanggulangan bencana di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
 - k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana :
 - a. Kegiatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana;
 - b. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik Dan Peralatan Bencana;
- 7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - a. Kegiatan Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana;
 - b. Kegiatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
- 8. Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca Bencana :
 - a. Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana;
 - b. Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekontruksi Pasca Bencana;

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk :

- a. Peningkatan Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
- b. Umpan Balik Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dilakukan melalui pembobotan bertingkat setiap tahapan dengan membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana Strategis yang disertai dengan pembiayaan.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Kegiatan Rencana Pengurangan Resiko Bencana, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana, Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2020 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program Renstra PD s/d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11=10/4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2625 Surat	2525 Surat	2525 Surat	2525 Surat	100%	2625 Surat	7675 Surat	292%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	36 Rekening	39 Rekening	36 Rekening	92%	36 Rekening	108 Rekening	300%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	22 OB	23 OB	44 OB	44 OB	100%	47 OB	114 OB	518%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	1 OB	0 OB	0 OB	0%	1 OB	2 OB	200%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	51 Jenis	69 Jenis	52 Jenis	52 Jenis	100%	51 Jenis	172 Jenis	337%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	100%	12 Jenis	34 Jenis	283%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	21 Jenis	300%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	9 Jenis	300%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1060 Pack	1050 Pack	490 Pack	490 Pack	100%	1060 Pack	2600 Pack	245%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	34 Orang	151 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	34 Orang	195 Orang	574%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	34 Orang	420 Orang	33 Orang	33 Orang	100%	53 Orang	506 Orang	1488%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	17 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0%	10 Jenis	10 Jenis	59%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program Renstra PD s/d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	10 Unit	0 Unit	0 Unit	16 Unit	0%	10 Unit	26 Unit	260%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	17 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	17 Unit	58 Unit	829%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0%	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	8 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	8 Jenis	10 Jenis	125%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	16 Jenis	14 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	100%	16 Jenis	46 Jenis	288%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	15 Unit	300%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	3 Jenis	300%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	3 Jenis	8 Jenis	267%
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	80 Stel	80 Stel	0 Stel	0 Stel	0%	80 Stel	160 Stel	200%
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	81,82%	100%	100%	100%	100%	182%	182%
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	13 Orang	9 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	13 Orang	22 Orang	169%
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	8 Buku	8 Buku	8 Buku	12 Buku	150%	8 Buku	28 Buku	350%
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan	3 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	3 Buku	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program Renstra PD s/d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	Semesteran	keuangan semester I dan semester II (Buku)								
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	3 Buku	100%
6	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	40 Orang	60 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	40 Orang	100 Orang	250%
		Jumlah Penanganan Kedaruratan	51 Kali	119 Kali	66 Kali	66 Kali	100%	71 Kali	256 Kali	502%
		Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	1 Tim	1 Tim	1 Tim	0 Tim	0%	1 Tim	2 Tim	200%
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	400 Paket	600 Paket	600 Paket	600 Paket	100%	600 Paket	1800 Paket	450%
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	50 Orang	60 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	50 Orang	110 Orang	220%
7	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	85%	81%	83%	83%	100%	85%	249%	293%
	Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah	11 Wilayah	58 Wilayah	57 Wilayah	98%	33 Wilayah	101 Wilayah	306%
		Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
		Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	25 Sekolah	25 Sekolah	7 Sekolah	7 Sekolah	100%	25 Sekolah	57 Sekolah	228%
		Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%
		Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	4 Sekolah	1 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0%	2 Sekolah	3 Sekolah	75%
	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	100%	3 Desa	9 Desa	300%
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	175 Paket	41 Paket	50 Paket	60 Paket	120%	50 Paket	151 Paket	86%
		Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Picket Kesiapsiagaan Bencana	40 Orang	325 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	40 Orang	365 Orang	913%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian program Renstra PD s/d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
		Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	50 Meter	50 Meter	0 Meter	0 Meter	0%	50 Meter	100 Meter	200%
		Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) yang dibentuk	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	2 Unit	200%
8	PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	90%	85%	87%	87%	0%	90%	262%	291%
	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150%
		Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	90 Orang	300%
		Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	5 Unit	167%
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	200%
		Jumlah SDM Paham JITU PASNA	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	90 Orang	300%
		Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	40 Orang	20 Orang	30 Orang	150%	40 Orang	110 Orang	275%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Malang belum sepenuhnya 100%. Hal ini dikarenakan Kabupaten Malang sebagai supermarketnya bencana dikarenakan semua bencana ada di Kabupaten Malang. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten Malang yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kabupaten Malang baru memiliki Perda No. 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, sedangkan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya. Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Malang sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Malang terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017, Keberhasilan pencapaian indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2020 sebagai berikut :

- 1 Pada Indikator Persentase Desa Tangguh Bencana dengan target 81,3%, tercapai 81,3% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (33 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) capaian sebesar 100% keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Pencegahan Dalam

Menghadapi Bencana dan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana.

- 2 Pada Indikator Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan dengan target 85%, tercapai 85% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 119 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 119 kejadian) Capaian 100% keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar logistik dan Peralatan Bencana.
- 3 Pada Indikator Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana yang Berhasil dioperasikan dengan target 100% tercapai 100%, keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana dan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. BPBD Kabupaten Malang mengikuti SPM di bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain:

1. Pelayanan informasi rawan bencana dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan indikator capaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan indikator capaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INDIKATOR KINERJA KUNCI												
1	Persentase Desa Tangguh Bencana		Jumlah Desa Tangguh Bencana yang direncanakan ----- x100% Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	90,6%	100%			90,6%	0%			
2	Presentase Jumlah Korban Bencana Yang Berhasil Diselamatkan		Jumlah Daerah Rawan Bencana ----- x100% Jumlah Korban yang berhasil diselamatkan	90,6%	95%			68%	60%			
3	Presentase Fasilitas Umum dan sarana Prasarana Yang Berhasil di Optimalkan		Jumlah Obyek Terdampak Bencana ----- x100% Jumlah Obyek yang Berhasil ditangani	100%	100%			47%	32,4%			
INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)												
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		0	0			100%	100%			
1.1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan Pekerjaan dokumen yang disusun ----- x100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan		0	0			100%	100%			

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	Persentase jumlah penduduk di Kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di Kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana $\frac{\text{Jumlah penduduk di Kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di Kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$		0	0			100%	100%			
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		0	0			100%	100%			
2.1	Persentase Penyelesaian dokumen PRB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan dokumen yang disusun $\frac{\text{Kemajuan dokumen yang disusun}}{\text{Kemajuan dokumen yang disusun dan disahkan}} \times 100\%$		0	0			100%	100%			
2.2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan dokumen yang disusun $\frac{\text{Kemajuan dokumen yang disusun}}{\text{Kemajuan dokumen yang disusun dan sudah disahkan}} \times 100\%$		0	0			100%	100%			
2.3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan $\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan warga negara dikawasan rawan bencana}} \times 100\%$		0	0			100%	100%			
2.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan $\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara di}} \times 100\%$		0	0			100%	100%			

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kawasan rawan bencana										
2.5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara di Kawasan rawan bencana}} \times 100\%$		0	0			100%	100%			
2.6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara di Kawasan rawan bencana}} \times 100\%$		0	0			100%	100%			
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		0	0			100%	100%			
3.1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan KLB}} \times 100\%$		0	0			100%	100%			
3.2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$		0	0			100%	100%			
3.3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh petugas}} \times 100\%$		0	0			100%	100%			

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah seluruh petugas dalam penanganan darurat bencana										
3.4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Jumlah keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$		0	0			100%	100%			

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tingkat kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat dari capaian kinerja BPBD Kabupaten Malang belum sepenuhnya 100%. Hal ini dikarenakan Kabupaten Malang sebagai supermarketnya bencana dikarenakan semua bencana ada di Kabupaten Malang. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten Malang yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kabupaten Malang baru memiliki Perda No. 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, sedangkan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya. Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Malang sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Malang terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai tugas :

1. Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap dan penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan, Menyusun dan menetapkan penyesuaian anggaran rasionalisasi dalam rangka pencegahan bencana non alam (penyebarluasan virus pademi covid-19);
10. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, berkoordinasi dan menginformasikan bahaya bencana non alam (virus pademi covid-19).

Untuk melaksanakan tugas dimaksud BPBD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
Fungsi ini merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
Fungsi Komando merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Malang tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
3. Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart nasional;
4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
7. Belum adanya kajian risiko bencana dan pemetaannya;
8. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua desa rawan bencana;
9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas; dan
11. Belum terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang tersusun dan terstruktur sesuai dengan tingkat keahlian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
12. Belum tersedianya sarana prasarana dan peralatan yang memadai dengan personil yang terlatih sesuai dengan tingkat keahlian dalam penyelenggaraan pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS) sebagai pusat data dan pengendalian dalam operasi BPBD;

13. Belum adanya kajian resiko, rencana aksi penanggulangan bencana non alam;
14. Belum adanya tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana non alam dalam hal ini (virus pademi covid-19).

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.
2. Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

Formulasi isu-isu penting yang dapat diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB);

3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Merencanakan, melaksanakan, menyusun dan berkoordinasi dalam pencegahan penyebaran virus pandemi covid-19 pada semua perangkat daerah, lintas lembaga, TNI, Polri, Akademisi, Pakar/Ahli, Stake holder, pemuka agama dan semua lapisan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D). Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil sebagai berikut :

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor;
2. Melaksanakan peraturan pemerintah tentang rasionalisasi Anggaran

dalam rangka pencegahan bencana non alam (penyebarluasan virus pandemi covid-19) antara lain sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan operasional masih dipertahankan dan tidak banyak dilaksanakan rasionalisasi dikarenakan sebagai pendukung operasional kegiatan pencegahan bencana non alam (penyebarluasan virus pandemi covid-19);
 - b. Melaksanakan penyesuaian pagu anggaran prioritas terhadap program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
 - c. Melaksanakan pergeseran pagu anggaran program dan kegiatan yang tidak mencukupi ke program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dan bencana non alam.
3. Membuat usulan tambahan pagu anggaran untuk program dan kegiatan bencana alam dan bencana non alam (dalam hal ini dalam rangka percepatan pencegahan penyebarluasan virus pandemi covid-19) antara lain sebagai berikut :
- a. Pengembangan sistem penanggulangan bencana;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar logistik dan peralatan bencana;
 - c. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana;
 - d. Pengurangan resiko bencana;
 - e. Desa tangguh bencana;
 - f. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - g. Mitigasi struktural;
 - h. Pendampingan psikososial;
 - i. Rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi;
 - j. Jitupasna.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Malang

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	5.278.150.997	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	5.278.150.997	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	8 Dokumen	95.042.788	Perencanaan Penganggaran , dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	8 Dokumen	95.042.788	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	95.042.788	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile KinerjaPD/Seurvei Kepuasan Masyarakat)	8 Buku	95.042.788	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	4.252.575.009	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	4.252.575.009	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	12 Bulan	2.914.172.757	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	12 Bulan	2.914.172.757	
	Penyediaan Administrasi dan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	12 OB	1.330.748.952	Penyediaan Administrasi dan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	47 OB	1.330.748.952	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Petugas Kebersihan	1 OB			Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Petugas Kebersihan	1 OB		

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelurahan					Kelurahan				
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	4.477.300	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Akhir	1 Buku	4.477.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	1 Dokumen	3.176.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	1 Buku	3.176.000	
1.3	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	75.854.000	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		75.854.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	80 Stel	63.854.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	80 Stel	63.854.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	20 Orang	12.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	20 Orang	12.000.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	448.447.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	448.447.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	7 Jenis	6.033.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	7 Jenis	6.033.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	Jumlah Alat-alat Listrik Kantor yang disediakan	51 Jenis	141.257.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Unit	141.257.700	

No.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Unit			Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	51 Unit		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 Jenis	47.684.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	15 Jenis	47.684.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	7.560.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	7.560.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1060 Pack	35.510.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	1060 Pack	35.510.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	34 HOK	140.112.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	34 Orang	210.402.000	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Ke Dalam Daerah	53 HOK	70.290.000		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan ke Dalam Daerah	53 Orang		
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	88.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	88.200.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2625 OK	7.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	2625 Surat	7.500.000	

No.	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	4 Rekening	80.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	4 Rekening	80.700.000	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	318.032.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	318.032.000	
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	17 Unit	297.220.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang di Pelihara Rutin dan Berkala	17 Unit	297.220.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah mebel yang dipelihara	3 Jenis	6.090.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala	3 Jenis	6.090.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	14 Jenis	4.882.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	14 Jenis	4.882.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	1 Jenis	9.840.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	1 Jenis	9.840.000	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	5 Unit			Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	5 Unit		
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara	95 %	3.577.754.400	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	95%	3.577.754.400	

No.	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelurahan	terpadu				Kelurahan				
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	95 %	209.705.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	95%	209.705.000	
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen rumusan kegiatan hasil forum Perangkat Daerah tervalidasi sesuai aplikasi SIPD	1 Dokumen	144.069.000	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 Dokumen	144.069.000	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah	43.548.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah	43.548.000	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sosialisasi Pengendalian Bencana di Sekolah (Pena Sekolah)	16 Sekolah	22.088.000		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	16 Sekolah	22.088.000	
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	95 %	1.341.672.100	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	95%	1.341.672.100	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	1 Dokumen	146.928.300	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	1 Dokumen	146.928.300	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	2 Sekolah	39.540.200	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	2 Sekolah/Madrasah	39.540.200	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	1 Unit	41.340.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pusat Pengendalian Oprasi (POSDALOPS)	1 Unit	41.340.000	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	Kab. Malang,	Jumlah Pengadaan Sarana dan	50 Paket	67.202.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	Kab. Malang,	Jumlah Pengadaan Sarana dan	50 Paket	67.202.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Terhadap Bencana	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prasarana Penanggulangan Bencana			Terhadap Bencana	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prasarana Penanggulangan Bencana			
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan	50 Meter	127.068.000	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mitigasi Struktural yang dilaksanakan	50 Meter	127.068.000	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	193.502.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	193.502.000	
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	2 Dokumen	162.807.000	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2 Kegiatan	162.807.000	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemulihan Rekontruksi Pasca Bencana	1 Kegiatan	77.083.000		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psicososial	30 Orang	77.083.000	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Paham Jitu Pasna	30 Orang	146.258.000		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2 Dokumen	146.258.000	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30 Orang	61.593.000		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Kegiatan	61.593.000	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	99.629.000		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Paham JITUPASNA	30 Orang	99.629.000	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2 Kegiatan	92.762.000		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	92.762.000	

No.	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembang Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	1 Dokumen	85.959.600	Pengembang Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	1 Tim	85.959.600	
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.	95 %	1.626.977.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.	95%	1.626.977.000	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	71 Kali	1.000.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	71 Kali	1.000.000.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600 Paket	626.977.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600 Paket	626.977.000	
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	95 %	399.400.300	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	95%	399.400.300	
	Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	40 Orang	175.028.200	Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	40 Orang	175.028.200	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	50 Orang	66.323.500		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	50 Orang	66.323.500	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	40 Orang	158.048.600		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	40 Orang	158.048.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan berupa usulan kegiatan.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2022. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

NO.	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	VOLUME		PERMASALAHAN	ALAMAT	CATATAN
1	2	3	4	5		6	7	8
1	JIRAN	Penanggulangan Bencana	Pengadaan Rambu-rambu Jalur Evakuasi Daerah Rawan Bencana	1 Unit	40.000.000	Desa memerlukan rambu lalu lintas berupa warning light di satu titik dan ditunjukkan ke dinas perhubungan	Jl Trisula No. 80 Dusun Krajan Kulon RT 05 RW 01, Kab. Malang, Donomulyo, Purworejo	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
2	SUPARMAN	Penanggulangan Bencana	Pembentukan dan Pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana di Desa	30 Orang	70.000.000	Desa memerlukan pembentukan dan pelatihan forum Pengurangan Resiko Bencana di desa sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi bencana	Desa Mentaraman, Kab. Malang, Donomulyo, Mentaraman	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
3	SUMARNO	Penanggulangan Bencana	Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	61.384.000	Desa memerlukan pelatihan kedaruratan penanganan bencana	Desa Lebakharjo, Kab. Malang, Ampelgading, Lebakharjo	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
4	MUJIANTO MR	Penanggulangan Bencana	Pengadaan Rambu-rambu Jalur Evakuasi Daerah Rawan Bencana	50 Unit	70.000.000	usulan diteruskan ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti	Jl Raya Ngadas RT 04 RW 01, Kec. Poncokusumo 65157, Kab. Malang, Pincokusumo, Ngadas	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
5	H. HASAN ASY'ARI	Penanggulangan Bencana	Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	61.384.000	usulan direkomendasikan karena perlu adanya pelatihan dan pembinaan anggota LINMAS demi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Kantor Desa Gondanglegi Kulon, Kab. Malang, Gondanglegi, Gondanglegi Kulon	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
6	JAMBURI	Penanggulangan Bencana	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	2 Set	70.922.000	Desa memerlukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jl Raya No 30 RT 12 RW 2, Kab. Malang, Kepanjen, Sengguruh	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
7	DIDIT MULYO SANTOSO	Penanggulangan Bencana	Pengadaan Rambu-rambu Jalur Evakuasi Daerah Rawan Bencana	50 Unit	68.327.000	Desa memerlukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana untuk Ketentraman dan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Desa Jatirejoyoso, Kab. Malang, Kepanjen, Jatirejoyoso	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
8	TIMBANG	Penanggulangan Bencana	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	36 Jenis	70.922.000	usulan direkomendasikan karena perlu adanya pelatihan dan pembinaan anggota LINMAS demi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Desa Duwet Krajan, Kab. Malang, Tumpang, Duwet Krajan	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah

NO.	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	VOLUME		PERMASALAHAN	ALAMAT	CATATAN
1	2	3	4	5		6	7	8
						masyarakat		
9	SULKAN	Penanggulangan Bencana	Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	61.384.000	usulan direkomendasikan karena perlu adanya pelatihan dan pembinaan anggota LINMAS demi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Desa Pucangsongo, Kab. Malang, Pakis, Pucangsongo	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
10	ABDUL KARIM	Penanggulangan Bencana	Pembentukan dan Pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana di Desa	30 Orang	61.634.000	Desa memerlukan pembentukan dan pelatihan forum Pengurangan Resiko Bencana di desa sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi bencana	Desa Kucur, Kab. Malang, Dau, Kucur	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
11	SUPRIADI	Penanggulangan Bencana	Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	61.384.000	usulan direkomendasikan karena perlu adanya pelatihan dan pembinaan anggota LINMAS demi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Desa Petungsewu RT 06 RW 02, Kab. Malang, Dau, Petungsewu	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
12	DEWI BUYATI	Penanggulangan Bencana	Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	61.384.000	usulan direkomendasikan karena perlu adanya pelatihan dan pembinaan anggota LINMAS demi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Dusun Krajan, Kab. Malang, Lawang, Bedali	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
13	MURTADJI	Penanggulangan Bencana	Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	61.384.000	usulan direkomendasikan sesuai dengan rekomendasi mitra bappeda	Jl Sumbersuko No 1, Kab. Malang, Lawang	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
14	UDI HARTOKO	Penanggulangan Bencana	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	36 Jenis	70.922.000	Desa memerlukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Dusun Krajan RT 003 RW 002, Kab. Malang, Pujon, Pujon Kidul	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
15	AGUS SUPRIADI	Penanggulangan Bencana	Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	60.000.000	usulan disetujui dengan anggaran menyesuaikan dengan kemampuan mitra bappeda	Desa Ampelgading, Kab. Malang, Tirtoyudo, Ampelgading	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota perencanaan dan tindakan penanggulangan bencana menjadi pedoman dan acuan dalam bentuk perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana apabila diintegrasikan dengan Kebijakan Nasional meliputi :

1. Pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
5. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN.
6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai .
7. Pemeliharaan arsip/dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
- 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;**
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;**
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. **Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;**
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran :

Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah Kebijakan dan Strategi BNPB adalah :

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya

- kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
 3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
 4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
 5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang-undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
 7. Terwujudnya keandalan sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
 8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;
2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
3. Peningkatan koordinasi multi pihak saat keadaan darurat;
4. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;
5. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;
6. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian Post Disaster Needs Assesment (PDNA) bersama instansi terkait.

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh BNPB adalah :

1. Program Pencegahan dan Pengurangan risiko bencana;
dengan kegiatan :
 - a. Mitigasi Struktural;
 - b. Mitigasi Non Struktural;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
 - d. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
2. Program Penanganan Darurat Bencana;
dengan kegiatan :
 - a. Tanggap darurat di daerah terkena bencana;
 - b. Pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana;
 - c. Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana;
 - d. Penanganan pengungsi akibat bencana.
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
dengan kegiatan :
 - a. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana;

- c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana.
- 4. Program Peralatan dan logistik;
dengan kegiatan :
 - a. Penyiapan logistik di kawasan rawan bencana;
 - b. Penyiapan peralatan di kawasan rawan bencana.
- 5. Program Data, Informasi dan Humas.
dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif.

3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasarana dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan indikator :

1. Persentase desa tangguh bencana;
2. Persentase jumlah korban bencana yang berhasil diselamatkan;
3. Persentase fasilitas umum dan sarana prasarana yang berhasil dioperasionalkan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat

urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 dilakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Penanggulangan Bencana :
- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang diikuti oleh peserta laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan. Sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana terutama untuk perempuan, dimana perempuan dan laki-laki memiliki peran sosial yang berbeda. Peran sosial yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berbeda, beban perempuan dan anak perempuan lebih berat kewajiban merawat dan memelihara anggota keluarga, selain merawat keluarga sendiri juga seringkali harus merawat anak dan kerabat lain yang keluarganya menjadi korban bencana.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Badan Penanggulangan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										95.042.788			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		104.547.067
1.05.01.2.01	Perencanaan Penganggaran , dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										95.042.788			Perencanaan , dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		104.547.067
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile KinerjaPD/Seurve i Kepuasan Masyarakat)	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 Buku	8 Dokumen	8 Dokumen	95.042.788	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	104.547.067
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4.252.575.009					4.677.832.510
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	3 Dokumen	3 Dokumen	2.914.172.757	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	12 Bulan	3.205.590.033
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi dan Tugas ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	47 OB	3 Dokumen	3 Dokumen	1.330.748.952	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	47 OB	1.463.823.847

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				tepat waktu	dan tepat waktu											
		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Petugas Kebersihan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 OB	3 Dokumen	3 Dokumen		PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	1 OB	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Dokumen Laporan Akhir	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Buku	3 Dokumen	3 Dokumen	4.477.300	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	1 Buku	4.925.030
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Buku	3 Dokumen	3 Dokumen	3.176.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	1 Buku	3.493.600
1.05.01.2.05	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										75.854.000					83.439.400
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	80 Stel	1 Dokumen	1 Dokumen	63.854.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	80 Stel	70.239.400
1.05.01.2.06	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja	20 Orang	13.200.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)		daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar									perangkat daerah dalam satu tahun (%)		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										448.447.200					493.291.920
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	6.033.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	7 Jenis	6.636.300
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	141.257.700	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	11 Unit	155.383.470
		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	51 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen		PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	51 Unit	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	15 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	47.684.500	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	15 Jenis	52.452.950

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				dengan benar	teradministrasi dengan benar											
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	7.560.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	3 Jenis	8.316.000
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1060 Pack	1 Dokumen	1 Dokumen	35.510.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	1060 Pack	39.061.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	34 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	210.402.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	34 Orang	231.442.200
		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan ke Dalam Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	53 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen		PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	53 Orang	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										88.200.000					97.020.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2625 Surat	2 Laporan	2 Laporan	7.500.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	2625 Surat	8.250.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Rekening	2 Laporan	2 Laporan	80.700.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	4 Rekening	88.770.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										318.032.000					349.835.200
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang di Pelihara Rutin dan Berkala	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	17 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	297.220.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	17 Unit	326.942.000
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	6.090.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	3 Jenis	6.699.000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	4.882.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan	14 Jenis	5.370.200

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)		urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kelurahan								penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)		
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	9.840.000	PAD		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	1 Jenis	10.824.000
		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen			Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	5 Unit		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										3.577.754.400					3.935.529.840
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										209.705.000					230.675.500
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Dokumen	50 Kegiatan	50 Kegiatan	144.069.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	1 Dokumen	158.475.900
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	33 Wilayah	50 Kegiatan	50 Kegiatan	43.548.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	33 Wilayah	47.902.800

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana											
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	16 Sekolah	50 Kegiatan	50 Kegiatan	22.088.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	16 Sekolah	24.296.800
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										1.341.672.100					1.475.839.310
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	146.928.300	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	1 Dokumen	161.621.130
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Sekolah/Maderasa Aman Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	2 Sekolah/M adrasah	1 Dokumen	1 Dokumen	39.540.200	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	2 Sekolah/M adrasah	43.494.220
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Pusat Pengendalian Oprasi (POSDALOPS)	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	41.340.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	1 Unit	45.474.000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	50 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	67.202.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	50 Paket	73.922.200
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Mitigasi Struktural yang dilaksanakan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	50 Meter	1 Dokumen	1 Dokumen	127.068.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	50 Meter	139.774.800
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	3 Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	193.502.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	3 Desa	212.852.200
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca	Persentase	Pemulihan	Jumlah	Jumlah	Kab.	95%	2 Kegiatan	1	1		PAD		Persentase	2 Kegiatan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Bencana Kabupaten Kota	Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Rehabilitasi Pasca Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen	Dokumen	162.807.000			Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)		179.087.700
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psicososial	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	30 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	77.083.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	30 Orang	84.791.300
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	146.258.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	2 Dokumen	160.883.800
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	61.593.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	1 Kegiatan	67.752.300
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah SDM Paham JITUPASNA	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	30 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	99.629.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	30 Orang	109.591.900
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	40 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	92.762.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	40 Orang	102.038.200
1.05.03.2.02.08	Pengembang Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Tim	1 Dokumen	1 Dokumen	85.959.600	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	1 Tim	94.555.560
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										1.626.977.000					1.789.674.700
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	71 Kali	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	71 Kali	1.100.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				darurat /pemulihan awal akibat bencana.	darurat /pemulihan awal akibat bencana.											
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	600 Paket	2 Laporan	2 Laporan	626.977.000	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	600 Paket	689.674.700
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										399.400.300					439.340.330
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparaturnya Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparaturnya Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	40 Orang	3 Sistem	3 Sistem	175.028.200	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	40 Orang	192.531.020
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparaturnya Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparaturnya Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	50 Orang	3 Sistem	3 Sistem	66.323.500	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	50 Orang	72.955.850
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparaturnya Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparaturnya Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	40 Orang	3 Sistem	3 Sistem	158.048.600	PAD		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	40 Orang	173.853.460

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 dilakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Penanggulangan Bencana :
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang diikuti oleh peserta laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan. Sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana terutama untuk perempuan dimana Perempuan dan laki-laki memiliki peran sosial yang dikonstruksikan secara berbeda, peran sosial yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berbeda, beban perempuan dan anak perempuan lebih berat kewajiban merawat dan memelihara anggota keluarga, selain merawat keluarga sendiri juga seringkali harus merawat anak dan kerabat lain yang keluarganya menjadi korban bencana.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											3.672.797.188	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										95.042.788		
1.05.01.2.01	Perencanaan Penganggaran , dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										95.042.788		
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile KinerjaPD/Seurvei Kepuasan Masyarakat)	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 Buku	8 Dokumen	8 Dokumen	95.042.788	PAD	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4.252.575.009		
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	3 Dokumen	3 Dokumen	2.914.172.757	PAD	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi dan Tugas ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	47 OB	3 Dokumen	3 Dokumen	1.330.748.952	PAD	
		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Petugas Kebersihan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 OB	3 Dokumen	3 Dokumen		PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Dokumen Laporan Akhir	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Buku	3 Dokumen	3 Dokumen	4.477.300	PAD	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Buku	3 Dokumen	3 Dokumen	3.176.000	PAD	
1.05.01.2.05	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										75.854.000		
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	80 Stel	1 Dokumen	1 Dokumen	63.854.000	PAD	
1.05.01.2.06	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	PAD	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										448.447.200		
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	6.033.000	PAD	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	141.257.700	PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dalam satu tahun (%)											
		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	51 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen		PAD	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	15 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	47.684.500	PAD	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	7.560.000	PAD	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1060 Pack	1 Dokumen	1 Dokumen	35.510.000	PAD	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	34 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	210.402.000	PAD	
		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan ke Dalam Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	53 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen		PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)		dan teradministrasi dengan benar	dan teradministrasi dengan benar								
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										88.200.000		
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2625 Surat	2 Laporan	2 Laporan	7.500.000	PAD	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Rekening	2 Laporan	2 Laporan	80.700.000	PAD	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										318.032.000		
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang di Pelihara Rutin dan Berkala	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	17 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	297.220.000	PAD	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	6.090.000	PAD	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	4.882.000	PAD	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	9.840.000	PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Keterangan
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		perangkat daerah dalam satu tahun (%)		dengan benar	dengan benar								
		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen		PAD	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										3.577.754.400		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										209.705.000		
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Dokumen	50 Kegiatan	50 Kegiatan	144.069.000	PAD	PUG
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	33 Wilayah	50 Kegiatan	50 Kegiatan	43.548.000	PAD	PUG
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	16 Sekolah	50 Kegiatan	50 Kegiatan	22.088.000	PAD	PUG
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										1.341.672.100		
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	146.928.300	PAD	PUG
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Sekolah/Maderrasah Aman Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	2 Sekolah/M adrasah	1 Dokumen	1 Dokumen	39.540.200	PAD	PUG
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Pusat Pengendalian Oprasi (POSDALOPS)	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	41.340.000	PAD	PUG
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pemenuhan mitigasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Pemberdayaan	Kab. Malang, Semua	95%	50 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	67.202.000	PAD	PUG

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Prasarana Penanggulangan Bencana	Pengurangan Resiko Bencana	Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kecamatan, Semua Kelurahan							
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Mitigasi Struktural yang dilaksanakan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	50 Meter	1 Dokumen	1 Dokumen	127.068.000	PAD	PUG
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	3 Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	193.502.000	PAD	PUG
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	2 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	162.807.000	PAD	PUG
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psicososial	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	30 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	77.083.000	PAD	PUG, PEN
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	146.258.000	PAD	PUG
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	61.593.000	PAD	PUG, PEN
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah SDM Paham JIUPASNA	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	30 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	99.629.000	PAD	PUG
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	40 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	92.762.000	PAD	PUG
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Tim	1 Dokumen	1 Dokumen	85.959.600	PAD	PUG
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										1.626.977.000		
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara	Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua	95%	71 Kali	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000	PAD	PUG

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		terpadu (%)		/pemulihan awal akibat bencana.	/pemulihan awal akibat bencana.	Kelurahan							
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	600 Paket	2 Laporan	2 Laporan	626.977.000	PAD	PUG, PEN
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										399.400.300		
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	40 Orang	3 Sistem	3 Sistem	175.028.200	PAD	PUG
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	50 Orang	3 Sistem	3 Sistem	66.323.500	PAD	PUG
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	40 Orang	3 Sistem	3 Sistem	158.048.600	PAD	PUG

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	I		II		III		IV			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	9.840.000	PAD	25	25	25	25	25	25	25	25		
		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen			PAD	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										3.577.754.400											
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										209.705.000		25	25	25	25	25	25	25	25		
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Dokumen	50 Kegiatan	50 Kegiatan	144.069.000	PAD	0	0	0	0	100	100	0	0		
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	33 Wilayah	50 Kegiatan	50 Kegiatan	43.548.000	PAD	25	25	25	25	25	25	25	25		
		Persentase Pemenuhan pengenalan bencana di Sekolah (PENA)	Jumlah Sosialisasi Bencana di Sekolah (PENA)	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua	95%	16 Sekolah	50 Kegiatan	50 Kegiatan	22.088.000	PAD	21	21	34	34	34	34	11	11		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	I		II		III		IV		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		terpadu (%)	SEKOLAH)	Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Kelurahan															
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										1.341.672.100		25	25	25	25	25	25	25	25	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	146.928.300	PAD	0	0	100	100	0	0	0	0	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Sekolah/Mader asah Aman Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	2 Sekolah/ Madrasah	1 Dokumen	1 Dokumen	39.540.200	PAD	25	25	25	25	25	25	25	25	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Pusat Pengendalian Oprasi (POSDALOPS)	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	41.340.000	PAD	25	25	25	25	25	25	25	25	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulanga n Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	50 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	67.202.000	PAD	0	0	100	100	0	0	0	0	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Mitigasi Struktural yang dilaksanakan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	50 Meter	1 Dokumen	1 Dokumen	127.068.000	PAD	0	0	0	0	100	100	0	0	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	3 Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	193.502.000	PAD	34	34	32	32	34	34	0	0	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	2 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	162.807.000	PAD	0	0	50	50	0	0	50	50	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	I		II		III		IV		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psicososial	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	30 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	77.083.000	PAD	0	0	0	0	100	100	0	0	
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	146.258.000	PAD	0	0	50	50	0	0	50	50	
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	61.593.000	PAD	0	0	0	0	84	84	16	16	
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah SDM Paham JITUPASNA	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	30 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	99.629.000	PAD	49	49	51	51	0	0	0	0	
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	40 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	92.762.000	PAD	73	73	27	27	0	0	0	0	
1.05.03.2.02.08	Pengembang Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	1 Tim	1 Dokumen	1 Dokumen	85.959.600	PAD	100	100	0	0	0	0	0	0	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										1.626.977.000		25	25	25	25	25	25	25	25	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	71 Kali	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000	PAD	100	100	0	0	0	0	0	0	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Persentase Pemenuhan mitigasi dan	Jumlah Ketersediaan Barang	Jumlah Pelayanan Penyelamatan,	Jumlah Pelayanan Penyelamatan,	Kab. Malang, Semua	95%	600 Paket	2 Laporan	2 Laporan	626.977.000	PAD	0	0	60	60	40	40	0	0	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022							Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	I		II		III		IV		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Bencana Kabupaten/kota	pengendalian bencana secara terpadu (%)	Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.	Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.	Kecamatan, Semua Kelurahan															
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										399.400.300		25	25	25	25	25	25	25	25	
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	40 Orang	3 Sistem	3 Sistem	175.028.200	PAD	0	0	0	0	100	100	0	0	
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	50 Orang	3 Sistem	3 Sistem	66.323.500	PAD	0	0	100	100	0	0	0	0	
		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu (%)	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	40 Orang	3 Sistem	3 Sistem	158.048.600	PAD	0	0	100	100	0	0	0	0	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam rangka mencapai target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, isi dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2022 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2022.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI